

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui sidang umum mengesahkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai lanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun yang sama. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah program pembangunan yang berkelanjutan dan disusun bersama oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015. SDGs menjadi sebuah peta perjalanan pembangunan global yang berfokus pada kesejahteraan manusia, perlindungan lingkungan, dan penciptaan perdamaian serta keadilan secara global. SDGs ini memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran yang hendak dicapai dan tentunya dirancang untuk mengatasi berbagai masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat dunia, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih berkelanjutan. Tujuan dari konsep pembangunan yang berkelanjutan yaitu, untuk mewujudkan keperluan masa kini, tanpa mengurangi keahlian generasi masa depan dalam memenuhi keperluan mereka.

SDGs memiliki prinsip inklusivitas, yang berarti bahwa semua negara, baik negara maju atau negara berkembang, mempunyai tanggung jawab dalam mencapai target ini. Setiap negara diharapkan dapat menyesuaikan target SDGs dengan konteks lokal, sambil tetap berupaya mencapai dampak global. Dengan target akhir di tahun 2030, SDGs menekankan pentingnya kemitraan antara stakeholder, termasuk dari pemerintah, swasta, organisasi yang langsung terjun dengan masyarakat, serta komunitas yang berada dibawah dalam menggapai tujuan-tujuan pembangunan secara berkelanjutan.

Indonesia, sebagai salah satu anggota PBB turut serta dalam pencapaian SDGs dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan berbagai kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Melalui Peraturan Presiden

No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah Indonesia berpedoman untuk mengimplementasikan SDGs di semua sektor pembangunan. SDGs ini adalah suatu tujuan global dan nasional dalam rangka mensejahterakan warga yang terdiri dari 17 tujuan. Hal ini tidak hanya di implementasikan di tingkat pusat, tetapi juga diterapkan hingga ke tingkat desa. Cakupan 17 tujuan tersebut yaitu : 1) Tanpa kemiskinan 2) Tanpa kelaparan 3) Sehat dan sejahtera 4) Pendidikan berkualitas 5) Keterlibatan perempuan desa 6) Layak air bersih dan sanitasi 7) Bersinergi bersih dan terbarukan 8) Pertumbuhan ekonomi merata 9) Infrastruktur dan Inovasi sesuai kebutuhan 10) Tanpa kesenjangan 11) Kawasan pemukiman aman dan nyaman 12) Konsumsi dan produksi sadar lingkungan 13) Tanggap perubahan iklim 14) Peduli lingkungan laut 15) Peduli lingkungan darat 16) Damai berkeadilan 17) Kemitraan untuk pembangunan.

Implementasi SDGs di tingkat Desa terdiri dari 18 tujuan, yang diturunkan dari SDGs nasional tetapi dalam SDGs Desa menambahkan salah satu aspek yang membedakan SDGs Desa dari SDGs Nasional adalah adanya penambahan satu tujuan yaitu, kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif. Tujuan ini berfokus pada penguatan kelembagaan desa serta pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Penambahan tujuan 18 ini menjadi langkah strategis yang penting, mengingat peran kelembagaan desa sangat krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi pembangunan di tingkat lokal. Kelembagaan desa yang dinamis akan mampu merencanakan dan mengelola pembangunan dengan lebih baik, sementara budaya desa yang adaptif memungkinkan masyarakat desa untuk menerima perubahan, baik dalam konteks modernisasi maupun pelestarian budaya lokal.

Dalam upaya menjalankan tujuan dari pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) di tingkat desa, pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan strategis. Salah satu kebijakan penting adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam menegaskan pentingnya peran desa dalam mendukung pencapaian SDGs. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan inklusif dalam memfokuskan aspek ekonomi, dan sosial, serta lingkungan dengan berkelanjutan hingga ke level pemerintahan terkecil, yaitu desa.

Kabupaten Tasikmalaya adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat, terletak di antara 7°02'29"- 7°49'08" lintang selatan dan 107°54'10"-108°25'52" bujur timur. Wilayah ini memiliki total luas 2.708,82 km², dengan garis pantai sepanjang sekitar 54,5 km dan area penangkapan ikan seluas 306 km². Secara administratif, Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Tiga kecamatan memiliki wilayah pesisir dan laut dengan luas keseluruhan 200,72 km² atau 7,41% dari luas wilayah kabupaten. Jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 1.853.160 jiwa, tersebar di 619.657 keluarga.

Dalam konteks Kabupaten Tasikmalaya, kebijakan terkait SDGs sudah di implementasikan melalui program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan strategi pembangunan daerah. Salah satu instrumen kebijakan yang sesuai adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tingkat kabupaten selama lima tahun kedepan, hingga ke tingkat desa (RPJMDes) yang memuat prioritas pembangunan desa selama delapan tahun kedepan. RPJMDes diharapkan dapat mengakomodasi program-program yang mendukung pencapaian SDGs ditingkat desa, baik dari aspek pemberdayaan warga, peningkatan terhadap akses ke pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Namun, penerapan kebijakan belum sepenuhnya terimplementasi dengan sempurna, karena masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Diantaranya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia baik itu tingkat desa, kecamatan bahkan di tingkat kabupaten, baik dari segi pemahaman terhadap konsep SDGs maupun dalam hal pengelolaan program pembangunan yang sesuai dengan tujuan SDGs. Selain itu, aspek keterbatasan dana seringkali

lebih difokuskan pada infrastruktur fisik daripada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Data skor pencapaian SDGs Kabupaten Tasikmalaya

Sumber : [SDGs Desa | Sistem Informasi Desa \(kemendesa.go.id\)](https://sdgsdesa.id)

Data diatas menunjukkan bahwa penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya masih jauh dari target optimal, dengan skor hanya 46,82%. Artinya dari 39 kecamatan dan 351 desa yang terlibat, pelaksanaan SDGs belum mencapai setengah dari potensi ideal yang dinantikan. Ini membuktikan bahwa terdapat permasalahan di dalam penerapan SDGs ke wilayah ini, baik dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi

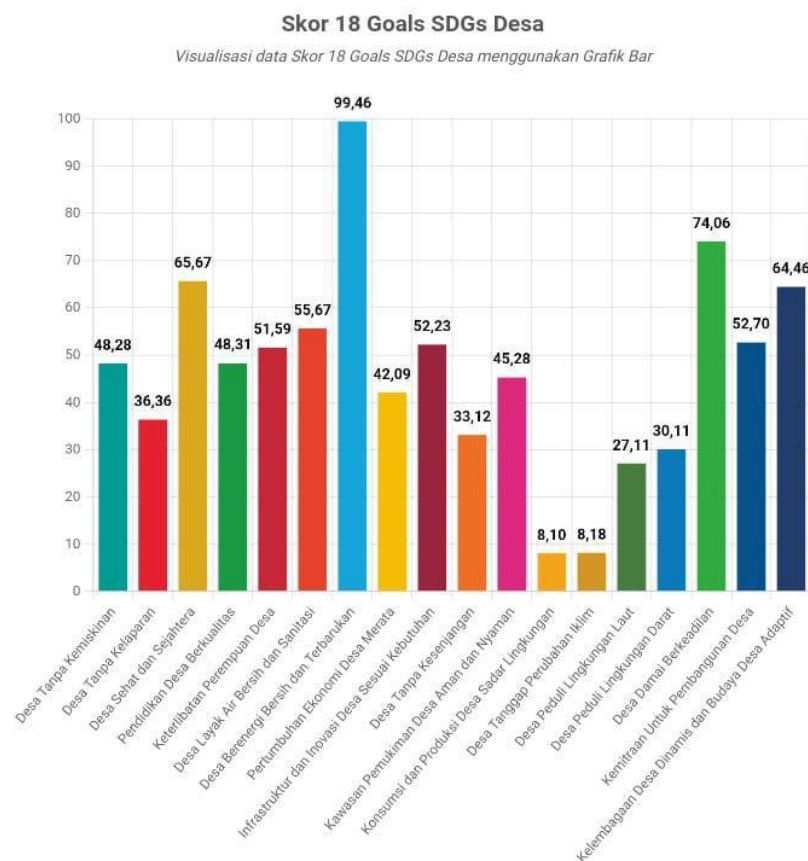
pelaksana, maupun struktur birokrasi yang belum optimal mendukung program tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa dan pendamping desa, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama, baik dari segi pemahaman terhadap konsep SDGs maupun dalam hal pengelolaan program pembangunan yang sesuai dengan tujuan SDGs. Di tingkat kecamatan, para aparatur juga menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam perencanaan pembangunan lokal. Hal ini disebabkan oleh minimnya panduan teknis dan pendampingan yang diberikan, sehingga perencanaan cenderung bersifat umum dan kurang relevan dengan kondisi di lapangan sehingga program-program pembangunan yang dijalankan tidak selalu sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tantangan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan maupun pendampingan, sangat penting untuk memastikan pelaksanaan SDGs dapat berjalan secara efektif di semua tingkatan pemerintahan. Selain itu penggunaan dana desa lebih sering difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan dan bangunan, sementara aspek sosial dan lingkungan seperti, desa tanggap perubahan iklim, konsumsi dan produk desa sadar lingkungan seringkali kurang diperhatikan.

Permasalahan mengenai sikap atau juga komitmen dalam penerapan SDGs Desa di kabupaten Tasikmalaya menjadi suatu hambatan, ditemukan bahwa beberapa perangkat desa, dan pendamping desa tingkat kecamatan memiliki pemahaman yang masih terbatas terhadap urgensi dan manfaat penerapan SDGs. Hal ini mengakibatkan rendahnya inisiatif dalam mengintegrasikan tujuan SDGs ke dalam program pembangunan desa. Sebagian besar perangkat desa menganggap SDGs hanya sebagai kebijakan administratif yang tidak memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan masyarakat desa, sehingga implementasi di lapangan berjalan lambat.

Selain itu, kurangnya komitmen dari pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten turut memengaruhi pelaksanaan SDGs di desa-desa. Beberapa pendamping desa mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor masih terhambat oleh perbedaan prioritas dan pandangan mengenai pentingnya SDGs. Padahal, komitmen yang kuat dari setiap tingkatan pemerintahan sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program.



Gambar 1. 2 Grafik pencapaian indikator SDGs Kabupaten Tasikmalaya
Sumber : [SDGs Desa | Sistem Informasi Desa \(kemendesa.go.id\)](https://sdgsdesa.sisteminformasidesa.kemendesa.go.id)

Berdasarkan grafik skor 18 Goal SDGs Desa di Kabupaten Tasikmalaya, terlihat adanya variasi yang signifikan dalam pencapaian setiap indikator. Beberapa indikator mencatat pencapaian yang sangat tinggi, sementara yang lain masih menghadapi tantangan besar. Skor tertinggi pada indikator seperti Desa Bersinergi Bersih dan Terbarukan dengan nilai 99,46 menunjukkan

keberhasilan dalam penerapan kebijakan yang mendukung energi terbarukan di desa. Hal ini disebabkan oleh tersedianya akses ke teknologi energi bersih dan dukungan pemerintah atau lembaga terkait untuk program energi berkelanjutan. Selain itu, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya penggunaan energi terbarukan dapat menjadi faktor pendukung utama pencapaian skor yang maksimal ini.

Indikator Desa Damai Berkeadilan serta Desa Sehat dan Sejahtera juga mencatat skor yang cukup baik (74,06 dan 65,67) yang dapat dikaitkan dengan adanya program-program yang sejalan mengenai kedamaian dan juga kesehatan yang cukup berjalan dengan baik serta komitmen dalam melestarikan budaya lokal dan mendorong inklusi sosial. Namun, meskipun menunjukkan hasil yang positif, capaian ini masih bisa ditingkatkan dengan pemerataan akses terhadap fasilitas kesehatan yang lebih baik serta upaya yang lebih maksimal dalam menjaga kedamaian di lingkungan.

Skor menengah pada indikator Pendidikan Desa Sejahtera 48,31 mengindikasikan bahwa meskipun sudah terdapat fasilitas pendidikan, tetapi aksesnya yang masih terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang kurang layak di beberapa kecamatan. Sekolah yang jauh, kurangnya sarana transportasi, infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan yang sulit diakses, dapat menghambat anak-anak di lingkup pedesaan untuk mendapatkan pendidikan yang optimal. Kualitas pendidikan yang bervariasi, kualitas pengajaran dan fasilitas pendukungnya, seperti peralatan belajar dan tenaga pengajar yang tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya bisa menghambat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Peran ekonomi juga sangat berperan penting dalam rendahnya skor pendidikan. Keluarga dengan kondisi ekonomi lemah, mungkin kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, meskipun sudah ada program banyak beasiswa dari pemerintah, tetapi untuk kesehariannya belum optimal bisa membantu.

Rendahnya skor indikator Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan yaitu 8,10 menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Tasikmalaya masih

menghadapi tantangan besar dalam menerapkan praktik konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Permasalahan mengenai kurangnya edukasi mengenai pengelolaan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan belum merata, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak konsumsi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan jangka panjang.

Tabel 1. 1 Hasil Skor SDGs per-Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

SKOR SDGs Per Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya					
No	Kecamatan	Skor	No	Kecamatan	Skor
1	Cipatujah	43,89	21	Karangjaya	45,33
2	Karangnunggal	42,35	22	Manonjaya	46,13
3	Cikalong	42,90	23	Gunungtanjung	43,65
4	Pancatengah	42,73	24	Singaparna	46,98
5	Cikatomas	41,42	25	Sukarame	45,26
6	Cibalong	43,14	26	Mangunreja	55,77
7	Parungponteng	49,32	27	Cigalontang	43,16
8	Bantarkalong	37,80	28	Leuwisari	48,61
9	Bojongasih	45,22	29	Sariwangi	53,04
10	Culamega	40,09	30	Padakembang	45,33
11	Bojonggambir	42,57	31	Sukaratu	51,66
12	Sodonghilir	48,02	32	Cisayong	43,70
13	Taraju	45,00	33	Sukahening	49,17
14	Salawu	48,52	34	Rajapolah	50,65
15	Puspahiang	46,87	35	Jamanis	44,74
16	Tanjungjaya	43,08	36	Ciawi	44,07
17	Sukaraja	44,35	37	Kadipaten	45,00
18	Salopa	45,28	38	Pagerageng	49,51
19	Jatiwaras	44,09	39	Sukaresik	50,62
20	Cineam	46,10			

Sumber :Dokumen SDGs Desa [SDGs Desa | Sistem Informasi Desa \(kemendes.go.id\)](#) Diolah Peneliti (2024)

Dari gambar yang disajikan diatas mengenai hasil skor SDGs tiap kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, dari 39 kecamatan hanya ada 5 kecamatan yang skor SDGs melebihi 50%, sedangkan 34 kecamatan lainnya masih dibawah skor 50%. Jika dilihat dari skor rata-rata SDGs Kabupaten yaitu 46,82% baru ada 13 kecamatan yang melampaui nilai rata-rata kabupaten, sedangkan 26 kecamatan dibawah nilai 46,82%. Skor tertinggi juga baru 55,77 yaitu Kecamatan Mangunreja, sedangkan skor yang paling rendah

ada di kecamatan Bantarkalong dengan skor 37,80 ketimpangan pencapaian terhadap target pelaksanaan SDGs sangat jauh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pencapaian target SDGs di Kabupaten Tasikmalaya masih jauh dari optimal. Ketimpangan dalam pencapaian SDGs ini juga mencerminkan adanya disparitas dalam akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bersama dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di seluruh wilayah.

Selain itu, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun 5 kecamatan yang telah berhasil mencapai skor SDGs 50% tetapi sebagian besar kecamatan masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai standar yang diharapkan. Rendahnya skor SDGs di 34 kecamatan menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan terfokus, baik dari segi kebijakan, alokasi anggaran, maupun pemberdayaan masyarakat untuk memastikan bahwa semua kecamatan dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian target SDGs di Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, upaya peningkatan pencapaian SDGs perlu difokuskan pada kecamatan-kecamatan yang masih tertinggal, dengan memperkuat peran pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat dan juga masyarakat dalam rangka merencanakan serta mengimplementasikan program-program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal, potensi daerah, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan tersebut Salah satu penyebab utamanya adalah adanya pola hierarki yang kaku dan kurang efektif dalam mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa. Hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa menunjukkan bahwa komunikasi lintas tingkat pemerintahan cenderung lambat, sehingga pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan SDGs sering tertunda. Selain itu, prosedur birokrasi yang berbelit membuat implementasi program SDGs, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tidak berjalan efisien. Hal ini tercermin dari ketimpangan skor SDGs di Kabupaten

Tasikmalaya, dimana mayoritas kecamatan masih berada di bawah rata-rata skor kabupaten.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar sektor dalam struktur birokrasi memperburuk pelaksanaan SDGs. Misalnya, program pembangunan yang dirancang oleh satu dinas sering kali tidak sinkron dengan kebijakan dinas lain, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan kurangnya fokus pada pencapaian indikator SDGs. Para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa juga mengeluhkan minimnya pendampingan teknis dari kabupaten yang seharusnya membantu mereka memahami dan menerjemahkan indikator SDGs ke dalam program pembangunan lokal. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa reformasi dalam struktur birokrasi, seperti penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi lintas sektor, sangat diperlukan untuk memastikan implementasi SDGs dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Penerapan SDGs Desa di Kabupaten Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, terdapat empat variabel kunci yang berdampak efektivitas implementasi kebijakan, adalah : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Di Kabupaten Tasikmalaya, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan pembangunan desa, hasil menunjukkan bahwa hanya 5 dari 39 kecamatan yang berhasil mencapai skor SDGs di atas 50%. Selain itu, komunikasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat terkait dengan SDGs juga masih lemah, sehingga mengurangi efektivitas program yang ada. Dengan demikian, permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SDGs di Kabupaten Tasikmalaya, dan bagaimana usaha yang dapat dilaksanakan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan SDGs di Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana penerapan kebijakan SDGs ini dijalankan dan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan SDGs di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya”**. Penelitian ini sangat penting, mengingat bahwa penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa memiliki peran krusial dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten ini, dengan keberagaman sumber daya alam dan potensi desanya, menghadapi tantangan dalam pencapaian SDGs Desa yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan.

B. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi dan sosialisasi kebijakan SDGs Desa kepada masyarakat dan antar pemangku kepentingan, sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
2. Terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan SDGs Desa
3. Tidak semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman, komitmen, dan kemauan yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs Desa, yang berdampak pada kurangnya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inovasi dalam menjalankan program serta adanya ketimpangan pembangunan antar desa
4. Struktur birokrasi yang kaku dan prosedural seringkali memperlambat proses pelaksanaan, serta kurangnya koordinasi lintas sektor dan instansi menyebabkan tidak sinkronnya pelaksanaan SDGs Desa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi antara pemangku kepentingan dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana sumber daya dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana disposisi para pelaksana kebijakan dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komunikasi antara pemangku kepentingan dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui sumber daya dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui disposisi para pelaksana kebijakan dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya

E. Kegunaan Penelitian

Dari pnelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah (teoritis) dan kegunaan sosial (praktis), yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini berpotensi dapat menyumbangkan pemahaman dalam memperkaya perkembangan ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan penerapan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs)
- b. Penelitian ini menyediakan sumbangan dalam rangka pengembangan kerangka teoritis sebagai alat analisis untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

Dalam praktiknya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam merencanakan dan melaksanakan program yang mendukung pencapaian SDGs Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memfasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan program pembangunan.

F. Kerangka Berpikir

Terkait dengan kerangka pemikiran, peneliti merancang skema kerangka berpikir, yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, memahami faktor-faktor yang menghambat, serta menentukan tahapan-tahapan yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini akan dimulai dengan menganalisis bagaimana penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam proses analisis peneliti akan mengkaji sejauh mana SGGs ini sudah diterapkan dan akan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan SDGs.

Chandler dan Plano (1988), memberikan pengertian administrasi publik merupakan upaya pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya serta tenaga publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik (Keban, 2004).

Kedua penulis tersebut mengungkapkan bahwa administrasi publik adalah perpaduan antara seni dan ilmu yang berfokus pada pengelolaan urusan publik serta pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik melalui peningkatan atau penyempurnaan, khususnya dalam aspek organisasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan.

Penerapan atau implementasi kebijakan adalah proses kegiatan kebijakan yang sudah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik ini merupakan tujuan dari proses administratif dan politik serta mengatur tindakan pemerintah dalam menangani isu-isu publik. Kebijakan publik adalah panduan formal atau informal yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat kolektif, seperti kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, atau pengelolaan sumber daya.

Proses ini melibatkan identifikasi masalah formulasi kebijakan, pengambilan keputusan, serta evaluasi dampaknya terhadap masyarakat. Kebijakan publik ini hadir dari kebutuhan masyarakat dan merupakan respon dari pemerintah terhadap masalah-masalah yang dihadapi.

Carl J Federick (1940), mendefinisikan kebijakan publik merupakan rangkaian aksi atau aktifitas yang diajukan oleh individu, atau kelompok bahkan lembaga pemerintah di dalam suatu tempat tertentu dimana terjadi permasalahan dalam melaksanakan tujuan tersebut. Perspektif tersebut mengungkapkan bahwa pemikiran dari kebijakan melibatkan sikap yang memiliki arti dan tujuan yang menjadi bagian dari hal penting karena bagaimanapun kebijakan tersebut diharapkan melihat apa yang sebenarnya

harus dijalankan melainkan apa yang telah diajukan dalam menangani masalah (Rantung, 2024).

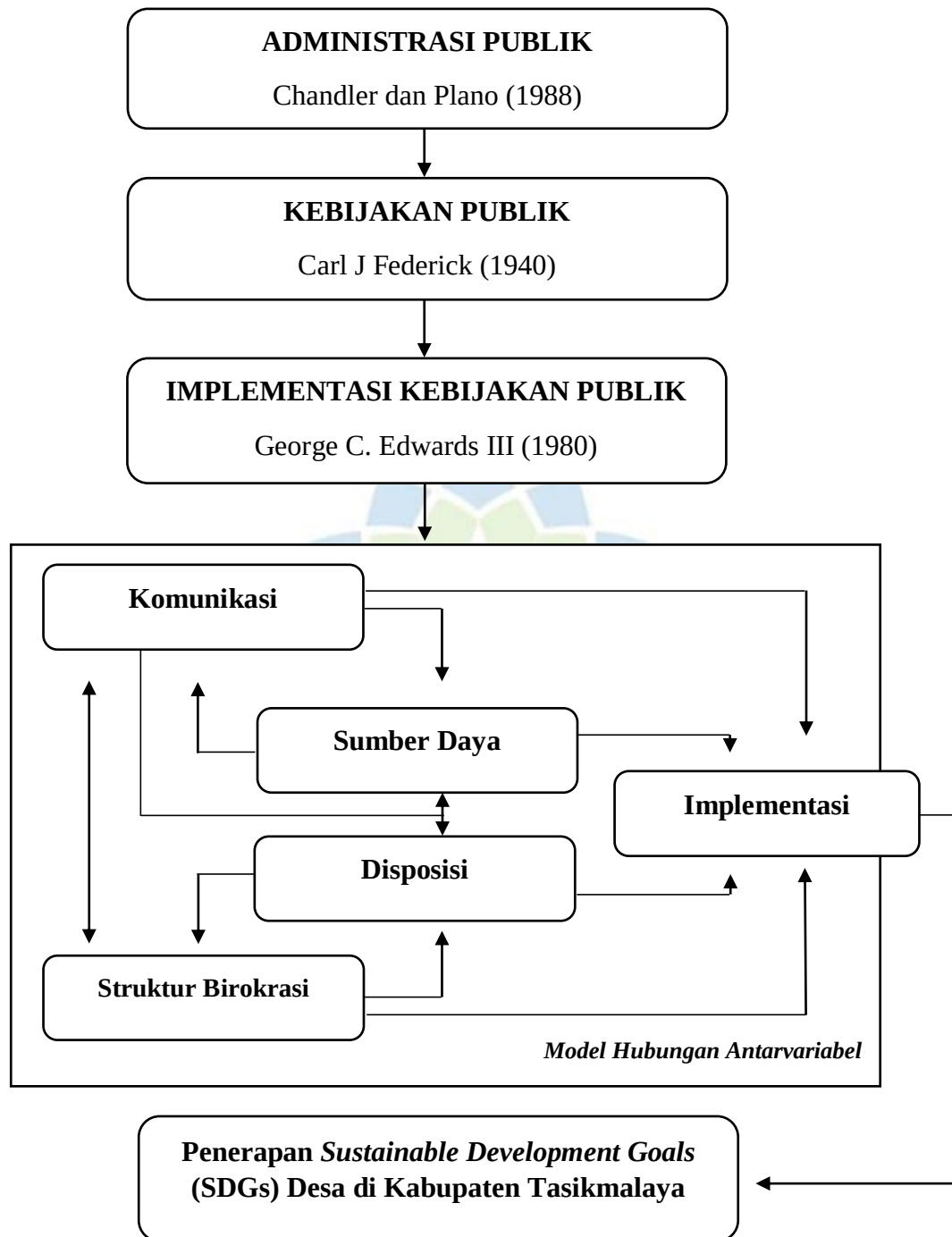
Menurut George C. Edward III (1980) implementasi kebijakan adalah proses untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah direncanakan. Implementasi ini diartikan sebagai proses dalam tahapan kebijakan, yang mana terdiri dari empat faktor kritis yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan (Anggara, 2014). Proses ini mencakup upaya untuk mencapai kebijakan dengan menerjemahkan arahan kebijakan menjadi tindakan nyata, Edward III berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi, adalah kunci kesuksesan dalam penerapan kebijakan, dimana pelaksana dituntut memahami dengan jelas tindakan yang perlu dilaksanakan. Tujuan dan arahan kebijakan seharusnya disampaikan dengan baik terhadap kelompok yang menjadi sasaran (target grup) agar dapat mengurangi terjadinya distorsi dalam pelaksanaan.
2. Sumber daya, adalah aktor utama dalam penerapan kebijakan. Meskipun kebijakan sudah disampaikan dengan begitu jelas dan stabil, tetapi jika tetap pelaksana kekurangan sumber daya, berarti efektivitas dari implementasi akan terganggu. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, seperti kecakapan pelaksana, maupun sumber daya finansial.
3. Disposisi, merujuk pada sifat dan kualitas yang dimiliki para pelaksana kebijakan, diantaranya komitmen, kejujuran dan sikap demokratis. Jika pelaksana memiliki disposisi yang positif, kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Tetapi, jika dari pelaksana mempunyai perilaku atau pandangan yang tidak sesuai dari pembuat kebijakan, hal ini dapat menghambat efektivitas pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi, yang terdiri dari organisasi yang bertanggung jawab atas penerapan kebijakan, memiliki efek yang signifikan pada proses implementasinya. Unsur penting dari struktur birokrasi mencakup Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Apabila dari struktur organisasi berjalan rumit, hal ini dapat mengurangi efektivitas pemantauan dan menciptakan *red-tape* mengenai tahapan birokrasi yang berbelit dan kompleks, yang mana menciptakan aktivitas dari organisasi yang kurang fleksibel.

Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah implementasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kabupaten Tasikmalaya, karena itu, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 1.3 Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah Peneliti (2025)